

Stigma Sosial Terhadap Mahasiswi Pelanggar Tata Tertib

Oleh:

¹ Mayani; ² Yoyok Hendarso; ³ Abdullah Idi

^{1,2,3} Magistra Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

Emil: mayabilal648@yahoo.co.id

Abstrak

Stigma terbentuk dari penyimpangan yang dilakukan individu dan menggambarkan sesuatu yang sangat negatif. Hal ini seharusnya dapat dicegah pada saat proses pembentukan stigma. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pembentukan stigma terhadap mahasiswi pelanggar tata tertib dan penyebab mahasiswi melakukan pelanggaran tata tertib tersebut pada Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *fenomenologi*. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara kombinasi antara penelitian pustaka, observasi lapangan dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma terhadap mahasiswi pelanggar tata tertib terbentuk atas peran lembaga pendidikan. Tahapan pembentukan stigma di awali dari adanya pelanggaran berupa penyimpangan primer (*primere deviance*) yang kemudian lembaga pendidikan memberi label/cap serta pandangan *sterotif* atau pandangan dimana pelanggaran merupakan suatu budaya bagi kelompok tertentu. Setelah itu lembaga memisahkan kelompok (*separation*) pelanggar tata tertib dengan kelompok pada umumnya dan terjadilah diskriminasi. Stigma kemudian terbentuk dan pada tahap akhir terjadilah penyimpangan lanjutan (*secondary deviance*), sehingga stigma melekat pada *devian*. Sedangkan penyebab dilakukannya pelanggaran tata tertib oleh mahasiswi Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang adalah terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal

Kata Kunci : Stigma; Pelanggaran; Tata Tertib; Labeling; Lembaga

Abstract

Stigma is formed from deviations by individuals and illustrates something very negative. This should be prevented during the stigma-forming process. This research was conducted with the aim to find out the process of forming a stigma against female disciplinary offenders and the causes of female students violating these rules at the Tunas Harapan Bangsa Midwifery Academy in Palembang. The method used in this research is a qualitative descriptive research method with a phenomenological approach. The collection technique is done by a combination of library research, field observations and indepth interviews. The results showed that the stigma against female disciplinary offenders was formed on the role of educational institutions. The stages of the formation of stigma begin with a violation in the form of a primary deviation (*primere deviance*) which then the educational institution gives a label / stamp as well as a stereotypical view or view where the violation is a culture for a particular group. After that the institution separates groups (*violators*) disciplinary rules with groups in general and there is discrimination. The stigma is then formed and in the final stage there is a secondary deviation, so that the stigma is attached to the deviant. While the causes of violations of the rules by the female students of the Tunas Harapan Bangsa Midwifery Academy Palembang consisted of two factors, namely internal and external factors.

Keywords: Stigma social; Violation; Code of conduct; Labeling; The institution

PENDAHULUAN

Tata tertib disusun untuk dipatuhi. Mulyono mengatakan bahwa tata tertib adalah kumpulan peraturan untuk menjadikan anggota masyarakat tetap berpegang teguh pada hukum positif yang sudah dirumuskan dan ditetapkan sebagai pijakan dalam mengantisipasi hal-hal yang berpotensi akan merusak tatanan lingkungan yang sudah ada, Rifai (2011). Tujuan disusunnya tata tertib agar terciptanya keadaan yang aman dan tenram, sebagaimana pendapat Siti Melchaty (Federawai, 2018) yang mengatakan bahwa tata tertib adalah peraturan-peraturan yang mengikat seseorang atau kelompok, guna menciptakan keamanan, ketentraman, orang tersebut atau kelompok orang tersebut.

Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa merupakan Lembaga Pendidikan diploma tiga kesehatan dengan program studi kebidanan di bawah naungan Yayasan Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa. Yayasan ini berdiri sejak tahun 2007 dengan Surat Keputusan Mendiknas/Ijin Dikti No. 125/D/O/2007 Rekomendasi Badan PPNSDMKES No. HK.03.2.4.1.02131 Akreditas BPPSDM Kemenkes NO. HK.06.01/III/01410/2011.

Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa sudah banyak meluluskan mahasiswinya. Mahasiswa angkatan pertama yang lulus adalah sebanyak 22 mahasiswa merupakan mahasiswa angkatan 2007. Mahasiswa angkatan 2008 yang lulus sebanyak 67 mahasiswa dan angkatan 2009 menurun menjadi 40 mahasiswa. Pada tahun 2015, mahasiswa Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa mengalami penurunan cukup drastis yaitu berjumlah 14 mahasiswa, tahun 2016 sebanyak 13 mahasiswa dan tahun 2017 meningkat kembali dengan jumlah mahasiswa sebanyak 24 mahasiswa. Terakhir di tahun 2018 jumlah mahasiswa Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa adalah sebanyak 18 mahasiswa.

Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang menerapkan tata tertib kepada seluruh mahasiswa pada saat di kelas dan di asrama. Harapan lembaga, dengan

adanya tata tertib akan menciptakan ketentraman dan keamanan bagi setiap mahasiswa yang sedang mengembangkan studi di lembaga pendidikan. Adapun tata tertib yang diterapkan oleh akademi kebidanan tunas Harapan Bangsa diantaranya peraturan tentang kewajiban-kewajiban bagi mahasiswa, tata tertib di asrama, larangan-larangan bagi mahasiswa dan sanksi terhadap pelanggar tata tertib. Walaupun tata tertib menjadi kesepakatan bersama, namun masih cukup banyak mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib tersebut.

Jenis dan Jumlah Pelanggar Tata tertib di AKBID Tunas Harapan Bangsa

Palembang

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar (orang)				Jumlah
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Bolos pada jam perkuliahan	5	2	1	1	9
2	Kabur dari Asrama	10	5	3	1	19
3	Tidak Beretika (melawan staff pengajar dan pegawai)	7	2	1	4	14
4	Tidak Mematuhi Peraturan Pendidikan	3	5	3	1	12
	Jumlah	25	14	8	7	25

Sumber: *Ka. Kemahasiswaan AKBID Tunas Harapan Bangsa Palembang*

Tabel tersebut menunjukkan jumlah pelanggar tata tertib di Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang dari tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah sebanyak 25 orang. Data juga memperlihatkan suatu masalah yaitu selalu adanya pelaku pelanggar tata tertib setiap tahun di Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa. Stigma adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika seseorang diberikan labeling, stereotif, separation dan mengalami diskriminasi, Scheid dan Brown (2010). *Labeling* merupakan pembedaan dan memberikan label atau penamaan berdasarkan

perbedaan individu tidak dianggap relevan secara sosial. *Sterotif* adalah kerangka fikir atau aspek kognitif terdiri dari pengetahuan dan keyakinan tentang kelompok sosial dan straits tertentu. *Separation* adalah pemisahan “kita” (sebagai pihak yang tidak memiliki stigma) dengan “mereka” (kelompok yang mendapatkan stigma). *Diskriminasi* merupakan perilaku yang merendahkan orang lain karena keanggotaannya dalam suatu kelompok, Rahman (2013). Pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa, akan menyebabkan munculnya *labeling*. Lembaga pendidikan beranggapan bahwa perbuatan melanggar tata tertib adalah tindakan di luar kewajaran, maka lembaga memberikan stigma kepada pelanggar tata tertib. Stigma tersebut merupakan suatu usaha untuk label tertentu sebagai sekelompok orang yang kurang patut dihormati daripada yang lain, Reseach (2009). Edwin M. Lemart (Sunarto, 2004) dalam teori labeling mengatakan bahwa stigma tercipta karena adanya *primary deviance* dan *secondary deviance*. Apabila seseorang telah dicap atau dijuluki sebutan tertentu oleh masyarakat sekitarnya (*primary deviance*), maka kelak bisa menjadi kenyataan karena kerap dijuluki demikian (*secondary deviance*).

Adanya stigma terhadap mahasiswa pelanggar tata tertib, akan peneliti perdalam dengan menggunakan teori labelling Edwin M. Lemart (Sunarto, 2004). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan stigma terhadap mahasiswa pelanggar tata tertib di Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi penyebab dilakukannya pelanggaran tata tertib oleh mahasiswa Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *fenomenologi*. Pendekatan *fenomenologi* akan membawa kita pada penjelasan tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa kebidanan yang mendapatkan stigma dari lembaga Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara kombinasi antara penelitian pustaka, observasi

lapangan dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisa data kualitatif, berpedoman pada teknik analisa data Crewell (2017) dengan tahapan; mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, memulai coding semua data, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis, dan menunjukkan deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Sedangkan teknik pemeriksaan dan keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stigma terhadap Mahasiswa Pelanggar Tata Tertib

Secara umum penelitian ini mendeskripsikan stigma yang diberikan oleh lembaga pendidikan terhadap mahasiswa pelanggar tata tertib. Lembaga pendidikan memiliki andil besar dalam membentuk stigma para pelanggar tata tertib. Penelitian ini menggunakan teori labelling Edwin M. Lemert (Sunarto, 2004) untuk menjawab proses terbentuknya stigma, yaitu terdapat dua jenis tindakan menyimpang; penyimpangan primer (*primary deviations*) merupakan penyimpangan pertama yang dilakukan, dan penyimpangan sekunder (*secondary deviation*) merupakan penyimpangan lanjutan atas label pada penyimpangan pertama (Sunarto, 2004). Kemudian, teori labelling dikolaborasikan dengan pendapat Scheid dan Brown (2010) yang menyatakan bahwa stigma merupakan fenomena ketika seseorang diberikan *labelling, sterotif, separation* dan mengalami diskriminasi.

Hasil penelitian pada proses terbentuknya stigma terhadap mahasiswa pelaku pelanggaran tata tertib di Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa adalah sebagai berikut; penyimpangan primer (*primere deviance*), pemberian label/cap dan pandangan *sterotif* oleh lembaga, pemisahan kelompok (*separation*) dan diskriminasi, terbentuknya stigma dan penyimpangan lanjutan (*secondary deviance*)

- 1) *Priemere Deviance* (Penyimpangan Utama)

Priemere Deviance atau penyimpangan primer dalam penelitian ini adalah pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswi Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang selama mengikuti pendidikan. Penyebab terjadinya penyimpangan primere adalah dikarenakan berbagai macam alasan, bisa karena faktor biologis, psikologis ataupun sosiologis, Ahmadi dan Nuraini (2005). Pelanggaran tersebut dilakukannya secara berulang kali, sehingga para pendidik yang merupakan unsur dari lembaga pendidikan, memberikan pandangan buruk terhadap mahasiswi pelanggar tata tertib tersebut. Pelanggaran tata tertib yang sering dilakukan mahasiswi Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa antara lain bolos pada saat jam pelajaran berlangsung, keluar dari asrama, meloncat pagar dan membantah tenaga pengajar. Pelanggaran yang dilakukan berulang, membuat staff pengajar bosan untuk menasehati para pelanggar.

Menurut Gott & Hirchi, individu yang memiliki kontrol diri (*self control*) rendah cenderung bertindak impulsif, lebih memilih tugas sederhana dan melibatkan kemampuan fisik, egois senang mengambil resiko dan mudah frustasi, Fauzia (2016). Maka dari itu, pelanggaran yang dilakukan mahasiswi Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa muncul karena adanya dorongan dalam diri dan tidak adanya *self kontrol* atau kontrol diri sehingga cenderung melakukan perlawanan terhadap tata tertib lembaga pendidikan.

Howard Becker (Widyastuti, 2013) berpendapat bahwa labelling bisa juga disebut sebagai penjulukan/ pemberian cap. Awalnya, menurut Teori Struktural devian atau penyimpangan dipahami sebagai perilaku yang ada dan merupakan karakter yang berlawanan dengan norma - norma sosial. Devian adalah bentuk dari perilaku. Labeling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada perilakunya satu per satu. Maka dari itu, pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswi akademi kebidanan tunas harapan bangsa merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang berlawanan dengan norma-norma sosial.

2) Pemberian Label/Cap dan Pandangan *Sterotif* oleh Lembaga

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, penyimpangan yang dilakukan oleh mahasiswi Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa dalam bentuk pelanggaran tata tertib, dianggap lembaga sebagai tindakan di luar kewajaran dan tidak dapat diterima. Lembaga memberikan pandangan kepada pelaku pelanggaran bahwa pelanggar tata tertib merupakan mahasiswi yang kurang ajar, membangkang, dengan etika yang sangat bobrok. Selain itu, lembaga memberikan pandangan nakal kepada pelanggar tata tertib. Lembaga mengkhawatirkan kenakalan itu akan membawa pengaruh terhadap mahasiswi lainnya. Pandangan lembaga tersebut membentuk label/cap terhadap mahasiswi pelanggar tata tertib.

Menurut Dirdjosisworo, *Labelling* adalah identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang di anggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. *Labeling* cenderung diberikan pada orang yang memiliki penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang di masyarakat, Erianjoni (2015). Maka label/cap sebagai mahasiswi kurang ajar, membangkang, dengan etika yang sangat “bobrok bagi pelanggar tata tertib, merupakan pemberian lembaga atas penyimpangan yang dilakukan para pelanggar. Selain itu, adanya istilah Kenakalan dan mempengaruhi, menunjukkan pelanggar telah mendapatkan label/cap buruk dari lembaga.

Setelah pelanggar tata tertib mendapatkan label/cap, lembaga memberikan pandangan *sterotif* kepada mereka. Sterotif adalah kerangka fikir atau aspek kognitif terdiri dari pengetahuan dan keyakinan tentang kelompok sosial dan straits tertentu. Sterotif merupakan keyakinan karakteristik tentang atribut personel yang dimiliki oleh orang-orang dalam suatu kelompok atau kategori sosial tertentu, Rahman, (2013). Sesuai dengan aspek *sterotif*, lembaga memberikan pandangan bahwa pelaku pelanggar tata tertib memiliki budaya yang berbeda dengan mahasiswi pada umumnya.

3) Pemisahan Kelompok (*Separation*) dan diskriminasi

Separation adalah pemisahan “kita” (sebagai pihak yang tidak memiliki stigma) dengan “mereka” (kelompok yang mendapatkan stigma). Hubungan label dengan

atribut negatif dan akan menjadi suatu pemberian ketika individu dilabel percaya bahwa dirinya memang berbeda, Rahman (2013). Maka pada tahap ketiga, lembaga akan memisahkan kelompok pelanggar tata tertib dengan kelompok mahasiswa yang patuh terhadap tata tertib. Pemisahan kelompok oleh lembaga, membentuk perilaku diskriminasi terhadap pelanggar tata tertib.

Diskriminasi merupakan perilaku yang merendahkan orang lain karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. Diskriminasi merupakan komponen behavioral, perilaku negative terhadap individu karena individu tersebut adalah anggota dari kelompok tertentu , Rahman, (2013). Theodorson dan Theodorson (Danandjaja, 2003) mendefinisikan diskriminasi sebagai perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya akan untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi. Diskriminasi terhadap pelanggar tata tertib terbentuk dengan alami, atas pemisahan kelompok yang dilakukan oleh lembaga. Lembaga memandang kelompok pelanggar tata tertib merupakan kelompok yang berbeda dan minoritas.

4) Terbentuknya Stigma dan Penyimpangan lanjutan (*secondary deviance*)

Stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya (KBBI, 2014). Sedangkan Erving Goffman (Santoso, 2016) berpendapat bahwa stigma adalah penamaan yang sangat negatif kepada seseorang/kelompok sehingga mampu mengubah secara radikal konsep diri dan identitas sosial mereka

Pada tahap *separation* dan diskriminasi, pelanggar tata tertib secara tidak langsung telah mendapatkan stigma sebagai mahasiswa yang berbeda dari mahasiswa umumnya. Label kurang ajar, membangkang, dengan etika yang sangat bobrok bagi pelanggar tata tertib, memberikan pengaruh terhadap perilaku individu tersebut. Pip

Jones (2009) dalam buku pengantar teori-teori sosial mengatakan bahwa reaksi orang-orang dengan stigma yang dikenakan kepadanya, lepas dari fakta ia bersalah atau tidak, teori labeling mengemukakan bahwa orang tersebut akhirnya benar-benar meneruskan penyimpangannya hanya karena pilihan untuk menjadi normal sudah tertutup. *Primary deviation* yang dilakukan pelanggar tata tertib telah membuka pintu terjadinya tindakan *secondary deviation*.

Sosiolog Edwin Lemert (Sunarto, 2004), mengatakan bahwa stigma tercipta karena adanya *primary deviance* dan *secondary deviance*. Apabila seseorang telah dicap atau dijuluki sebutan tertentu oleh masyarakat sekitarnya (*primary deviance*), maka kelak bisa menjadi kenyataan karena kerap dijuluki demikian (*secondary deviance*). Kajian teori labeling Lemert (Sunarto, 2004) menyebutkan bahwa penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/label dari masyarakat kepada seseorang akan menciptakan kecenderungan orang tersebut melanjutkan penyimpangan selanjutnya, yaitu penyimpang sekunder, khususnya dalam mempertahankan diri dari pemberian label tersebut.

Berdasarkan Teori Edwin Lemert dan kajian teori labeling (Sunarto, 2004) maka stigma yang diberikan kepada mahasiswa pelanggar tata tertib, membuat pelanggar tata tertib semakin meyakini bahwa stigma tersebut adalah jati dirinya di kehidupan kampus. Lembaga tidak menyadari, stigma/label negatif yang diberikan, memberikan dampak buruk terhadap pelanggar tata tertib dan berpengaruh terhadap perkembangannya. Evering Goffman (Ahmadi, 2005) memberikan istilah *the normal* bagi orang-orang yang tidak terstigma. Goffman Evering Goffman (Ahmadi, 2005) mengemukakan bahwa orang normal menganggap bahwa orang yang terstigma bukanlah orang normal. Stigma membuat pelanggar tata tertib merasa bahwa itulah jati dirinya di dalam kampus dan tindakan yang dilakukan adalah sebuah kewajaran hingga akhirnya pelanggar tata tertib melakukan penyimpangan lanjutan. Saat itulah telah dilakukannya *secondary deviance*. Pada akhirnya, stigma yang diberikan kepada pelanggar tata tertib membentuk perilaku yang tidak bermoral, kurang ajar, liar, pembangkang dan tukang gaduh.

Penyebab Terjadinya Pelanggaran Aturan Tata Tertib oleh Mahasiswa

Hasil penelitian dan didukung pendapat Walgito yang menyatakan bahwa pelanggaran kedisiplinan terhadap tata tertib di lingkup pendidikan seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal yang terdapat dalam diri sendiri dan faktor eksternal dari luar lingkungan, Dwi (2011) maka terdapat dua faktor yang menjadi penyebab pelanggaran tata tertib oleh mahasiswa Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri individu pelaku pelanggaran atas dorongan kemauan diri sendiri. Imelda (2015) menyebutkan faktor internal tumbuh berdasarkan keinginan dan dorongan melalui hasrat yang mengarah ke dalam bentuk tindakan ataupun perbuatan. Berdasarkan hasil penelitian, dorongan dalam diri mahasiswa untuk melakukan pelanggaran disebabkan oleh kehidupan asrama Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang yang mengekang mahasiswa. Dengan sistem asrama tertutup, mahasiswa tidak bisa melakukan interaksi dengan lebih banyak temannya. Pelaku pelanggaran merasa bahwa kehidupan di asrama merupakan bentuk pengekangan oleh lembaga. Pelaku pelanggar tata tertib, terbiasa dengan kehidupan yang bebas.

Adapun keterpaksaan melanjutkan studi Diploma III di Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang bagi pelaku pelanggaran tata tertib, juga menjadi faktor internal kedua, penyebab pelanggaran dilakukan. Hal ini sesuai temuan peneliti terhadap pelanggar tata tertib lembaga, bahwa sekolah di Akademi Kebidanan, merupakan keterpaksaan dan atas perintah orang tuanya. Orang tua pelanggar tata tertib merasa bangga melihat putrinya melanjutkan studi di Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang, sehingga mereka memaksa agar putri mereka dapat bersekolah di Lembaga Pendidikan terebut.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat Imelda,

(2015). Hasil penelitian pada faktor eksternal ditemukan adanya lingkungan asrama yang diisi dengan interaksi negatif. Terdapat budaya yang tidak baik di lingkungan asrama antara lain tindakan kasar oleh mahasiswi tingkat III terhadap mahasiswi tingkat bawah. Mahasiswi tingkat III memposisikan mereka sebagai senior. Selain itu sanksi atas tata tertib lembaga tidak dilajalkan dengan semestinya. Sanksi pelanggaran ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa surat peringatan 1 sampai dengan 3, sanksi berat yaitu skorsing hingga pemberhentian tidak dijalankan oleh lembaga.

Faktor eksternal lainnya adalah minimnya perhatian lembaga terhadap mahasiswi dan orang tua. Lembaga tidak memberikan perhatian khusus terhadap mahasiswi dan keluarganya. Lembaga tidak memperdulikan kondisi keuangan orang tua mahasiswi. Sanksi yang tidak tercantum dan tertulis dalam peraturan lembaga, seperti denda atas keterlambatan membayar SPP, denda dikarenakan telat membayar uang laundry serta denda-denda lainnya juga menjadi faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib oleh mahasiswi. Denda tersebut tidak tercantum dalam aturan, namun memaksa untuk ditaati

Faktor eksternal yang terakhir adalah kekecewaan terhadap fasilitas yang diberikan oleh Akademi dimana lembaga melakukan pembohongan publik terhadap calon mahasiswi baru dengan memberikan gambaran umum asrama dan lingkungan Pendidikan berserta fasilitas-fasilitas yang akan diberikan pada saat dilakukan pendaftaran ulang. Namun pada kenyataannya, fasilitas sebagaimana dimaksud tidak pernah diberikan oleh lembaga. Imelda (2015) menyebutkan faktor internal tumbuh berdasarkan keinginan dan dorongan melalui hasrat yang mengarah ke dalam bentuk tindakan ataupun perbuatan.

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa peran lembaga pendidikan dalam membentuk stigma mahasiswi pelanggar tata tertib sangat besar. Stigma terlihat akibat adanya pelabelan yang diberikan oleh lembaga. Stigma bermula dari penyimpangan primer (*primere deviance*) yang kemudian diberi label/cap serta pandangan *stereotif* oleh lembaga. Setelah itu terjadilah pemisahan kelompok

(*separation*) dan diskriminasi. Akhirnya stigma terbentuk. Pada tahap akhir terjadilah penyimpangan lanjutan (*secondary deviance*), sehingga stigma melekat pada *devian*. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswi Akademi Tunas Harapan Bangsa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut tercipta dikarenakan adanya fungsi dan peran lembaga yang salah. Imelda (2015) menyebutkan faktor internal tumbuh berdasarkan keinginan dan dorongan melalui hasrat yang mengarah ke dalam bentuk tindakan ataupun perbuatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa stigma terhadap mahasiswi pelanggar tata tertib Akademi terbentuk atas peran lembaga pendidikan. Tahapan pembentukan stigma di awali dari adanya pelanggaran berupa penyimpangan primer (*primere deviance*) yang kemudian lembaga pendidikan memberi label/cap serta pandangan *sterotif* atau pandangan dimana pelanggaran merupakan suatu budaya bagi kelompok tertentu. Setelah itu lembaga memisahkan kelompok (*separation*) pelanggar tata tertib dengan kelompok pada umumnya dan terjadilah diskriminasi. Stigma kemudian terbentuk dan pada tahap akhir terjadilah penyimpangan lanjutan (*secondary deviance*), sehingga stigma melekat pada *devian*.

Adapun yang menjadi penyebab dilakukannya pelanggaran tata tertib oleh mahasiswi Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang adalah terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal berupa dorongan dalam diri mahasiswi untuk melakukan pelanggaran, disebabkan oleh kehidupan asrama yang mengekang dan keterpaksaan mahasiswi melanjutkan studi pada Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa Palembang. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan asrama yang diisi dengan interaksi negatif dan budaya yang tidak baik, antara lain tindakan kasar oleh mahasiswi tingkat III terhadap mahasiswi tingkat bawah, sanksi atas tata tertib lembaga tidak dijalankan dengan semestinya, minimnya perhatian lembaga terhadap mahasiswi dan orang tua, sanksi yang tidak tercantum dan tertulis dalam peraturan lembaga, dan kekecewaan terhadap

fasilitas yang diberikan oleh lembaga pendidikan.

Saran yang direkomendasikan kepada pihak lembaga Pendidikan Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa yaitu agar lembaga tidak membentuk stigma terhadap pelanggar tata tertib, namun membangun karakter mahasiswa melalui upaya upaya *preventif*. Selain itu juga dengan adanya penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa Akademi Kebidanan Tunas Harapan Bangsa, maka lembaga mawas diri atas adanya interaksi negatif di dalam asrama. Pengawasan oleh lembaga harus diperketat, namun tetap dengan menggunakan sentuhan *humanisme*. Lembaga harus mampu menjadikan AKBID Tunas Harapan Bangsa sebagai wahana Ilmu Pengetahuan juga sebagai wahana memperkuat keimanan dan ketaqwaan mahasiswa. Setiap aturan yang dibuat lembaga, harus jelas, disepakati bersama dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Dadi & Nuraini, Aliyah. 2005. Teori Penjulukan. Bandung: Universitas Islam Bandung
- Creswell, John W. 2013. *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Third Edition)*. Diterjemahkan Achmad Fawaid. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Danandjaja. 2005. Diskriminasi terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia sehingga perlu ditanggulangi segera. Jakarta: Universitas Indonesia
- Dwi Anggoro, Nugroho. 2012. Pelanggaran Tata Tertib Sekolah dan Faktor-Faktor Penyebabnya Pada Siswa SMA Negeri 1 Geyer Kabupaten Grobongan
- Erianjoni. “ Pelabelan Orang Minangkabau pada Pelaku Penyimpangan Sosial: Studi Kasus pada Dua Nagari di Sumatera Barat”. Jurnal Humanus Vol 14 No1 Tahun 2015
- Federawati, Suryani. 2018. Peran Guru PPKN dalam Meningkatkan kesadaran Siswa

- Menaati Tata Tertib Sekolah. Semarang: Laboratorium PPKN UNS
- Goffman, Erving. 1963. Stigma, Notes on The Management of Spoiled Identity. New York Prentice Hall
- Imelda, Ade Febria. 2015. Faktor Penyebab Siswa Melanggar Tata Tertib Sekolah dan Upaya Sekolah mengatasinya di SMA AL-ISTIQOMAH Simpang Ampek, Sumatera Barat
- Jones, Pip. 2009. Pengantar Teori – teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post Modern. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Kamanto, Sunarto. 2004. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.
- Rahman, A. 2013. Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Research, Sane. 2009. Stigma The Media and Mental Illnes. www.sane.org diakses tanggal 1 Oktober 2019.
- Rifai, Muhammad. 2011. Sosiologi Pendidikan: Struktur Interaksi Sosial di dalam Institusi Pendidikan. Jogjakarta. Arruz Media
- Fauziah, Riris. 2016. Hubungan Self Kontrol Dengan Kepatuhan Tata Tertib Pada Siswa Madrasah Aliyah. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ample, Fakultas Psikologi Dan Kesehatan
- Santoso, Slamet. 2010. Teori-Teori Psikologi Sosial. PT. Refika Aditama
- Santoso, Danar Dwi. 2016. Stigmatisasi Orang Tua Tunggal Perempuan Di Masyarakat. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Scheid, T.L. & Brown, T.N. 2010. A Handbook For Study Of Mental Health Social Context. New York: Cambridge University Press
- Widyastuti, Dyah Ayu. 2013. Balap Motor Liar: Studi Deskriptif Mengenai Pelabelan Dan Tindakan Sosial Polisi. Surabaya